

Siaran Pers

GELAR RAKORBANGPUS, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS BAHAS RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dengan tema **“Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”**. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil membuka rapat yang dihadiri pejabat Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga, Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, dan Kantor Staf Presiden tersebut.

“Rakorbangpus untuk membahas kerangka penyusunan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 2017,” tutur Menteri Sofyan di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (13/4). Sejumlah agenda penting yang dilaksanakan dalam rapat di antaranya pemaparan rancangan kebijakan fiskal, kerangka pendanaan dan tata cara pelaksanaan anggaran 2017 oleh Kementerian Keuangan, dan pengendalian agenda prioritas nasional 2017 oleh Kantor Staf Presiden.

Menteri Sofyan menegaskan, dalam menyusun RKP 2017, prinsip *money follow program* dilakukan untuk mengamankan alokasi dana pada program prioritas dan meningkatkan efisiensi untuk belanja prioritas. Implementasi pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengerucutkan usulan program/kegiatan prioritas, mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan (Kementerian/Lembaga, subsidi, hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN), serta pembahasan mendetail untuk persiapan proyek.

“Agar dana bisa berdaya guna maksimal, nomenklatur harus betul-betul jelas sehingga menghindari penafsiran ganda,” papar Menteri Sofyan. Kementerian/Lembaga juga harus merumuskan mekanisme kerja sama yang efektif, sehingga pembangunan terintegrasi dapat terwujud. Dengan demikian, program pembangunan tak hanya bagus secara sektoral, tetapi juga bermanfaat secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, terintegrasi dan spasial.

Terkait pendanaan, Menteri Sofyan menegaskan Pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menyiasati terbatasnya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Proyek pembangunan akan ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu. Jika tidak bisa dikerjakan swasta, skema *Public Private Partnership* (PPP) akan dilaksanakan. Namun, apabila PPP tak terwujud, Pemerintah akan menyerahkan proyek untuk digarap oleh BUMN. Jika ketiga strategi tidak dapat dilakukan, maka Pemerintah akan menugaskan pembangunan proyek pada Kementerian/Lembaga.

Jakarta, 13 April 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650;
Faksimile (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id